

Judul : RUU Pengelolaan perbatasan: kewenangan BNPP bakal lebih kuat
Tanggal : Rabu, 03 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Pengelolaan Perbatasan Kewenangan BNPP Bakal Lebih Kuat

SENAYAN mengusulkan pembentukan UU Pengelolaan Perbatasan. Regulasi tersebut dianggap penting mengingat banyaknya permasalahan terkait wilayah itu. Dengan aturan itu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memiliki kewenangan lebih kuat.

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus menilai, pengelolaan perbatasan sudah tidak bisa dilakukan secara parsial. Setelah hampir delapan dekade merdeka, negara tak bisa lagi hanya merespons persoalan berdasarkan kasus per kasus.

"Jadi seperti atap bocor, lalu hanya menambal atapnya saja. Nggak bisa lagi seperti itu. Harus holistik," kata Deddy dalam Rapat Panitia Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri dan BNPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Politikus PDIP itu menegaskan, negara harus memiliki grand scenario. Negara harus memikirkan, apakah perbatasan ini mau dijadikan beranda depan NKRI atau jadi halaman belakang? Kalau paradigma kita beranda depan, maka pendekatannya harus holistik.

Dia menambahkan, persoalan perbatasan bukan sekadar kedaulatan dan batas wilayah, tapi juga harga diri bangsa. Dia membandingkan pembangunan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga yang dinilai jauh lebih agresif.

"Begitu kita bangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN), mereka langsung bikin jalan ratusan kilometer sampai ujung. Itu respons langsung," katanya.

Selanjutnya, kemiskinan di wilayah perbatasan juga jadi akar berbagai persoalan. Seperti perdagangan narkoba, penyelundupan kayu,

perdagangan manusia, hingga ketergantungan masyarakat pada negara tetangga. Jika masyarakatnya tidak makmur, perbatasan akan terus jadi pintu masuk untuk kejahatan-kejahatan itu.

Karenanya, sambung Deddy, posisi BNPP harus diperkuat. Lembaga itu perlu memiliki status dan kewenangan lebih besar, termasuk kemandirian anggaran dan peran koordinasi yang efektif antar-kementerian.

Saat ini, bahkan hanya untuk usulan membangun satu jalan di perbatasan, harus meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum. "Saat ada isu soal perdagangan harus melobi Menteri Perdagangan. Ini tidak bisa berlanjut," katanya.

Dia menilai, langkah paling realistis adalah mendorong pembentukan UU Pengelolaan Perbatasan, agar arah kebijakan nasional bersifat sistematis. Jika tidak ada dasar hukum yang kuat, perbatasan akan terus dianggap urusan biasa. Padahal masyarakat di sana sangat mencintai dan menjaga batas negara.

"Kapan mereka dapat perhatian layak? Tidak bisa kita biarkan mereka jadi budak negara sebelah, dan harus nge-mis ke negara sebelah hanya untuk sembako murah," ucapnya.

Senada, anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaini menilai, BNPP tak memiliki cukup kewenangan untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Lembaga itu hanya mampu melakukan pendataan, bukan penyelesaian.

"BNPP pada dasarnya hanya inventarisasi. Ketika bicara solusi, mereka bilang butuh ini dan itu, tapi tak punya kewenangan," ujar Anggota Fraksi PKS itu. ■ PVB